

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANJARBARU
SELATAN**

**DISUSUN OLEH PEMERINTAH KECAMATAN
BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang maha Kuasa karena Rencana Kerja Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Tahun 2025 Perubahan ini dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan salah satu media perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru selama Tahun 2025 .

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Namun kami berharap laporan ini memiliki nilai manfaat, setidaknya sebagai cerminan untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai dan sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami memohon saran tanggapan dan kritik yang bersifat membangun penyempurnaan laporan ini pada masa yang akan datang.

Banjarbaru, 25 Juni 2025

Camat Banjarbaru Selatan



ADI SURYA NOOR, S.STP, M.Si
NIP. 19791217 199810 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1 LATAR BELAKANG1

 1.2 LANDASAN HUKUM.....6

 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN7

 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANJARBARU SELATAN TAHUN LALU8

 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN
 BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU8

 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BANJARBARU SELATAN14

 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN
 BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU16

 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD17

 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....28

BAB III TUJUAN, SASARAN KECAMATAN BANJARBARU SELATAN.....36

 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI36

 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA
 BANJARBARU.37

 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....37

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA KECAMATAN
BANJARBARU SELATAN41

BAB V PENUTUP.....47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru merupakan implementasi dari visi dan misi Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarbaru Selatan 2021 - 2026 sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan. Dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ini diharapkan dapat terakomodasi dalam KUA-PPAS dan penetapan APBD Kota Banjarbaru Tahun 2025, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Perubahan Kecamatan Banjarbaru Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2025.
2. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup : Tahap perumusan rancangan Renja OPD.

Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja OPD

Perumusan rancangan Renja OPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 2) Analisis gambaran pelayanan OPD;
- 3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- 4) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
- 5) Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- 6) Perumusan tujuan dan sasaran;
- 7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- 8) Perumusan kegiatan prioritas;
- 9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- 10) Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
- 11) Pembahasan forum OPD; dan
- 12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Tahap Penyajian rancangan Renja OPD merupakan sistematika penyajian Rancangan Renja yang disiapkan dan ditetapkan untuk menguraikan perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat beserta pagu indikatifnya.

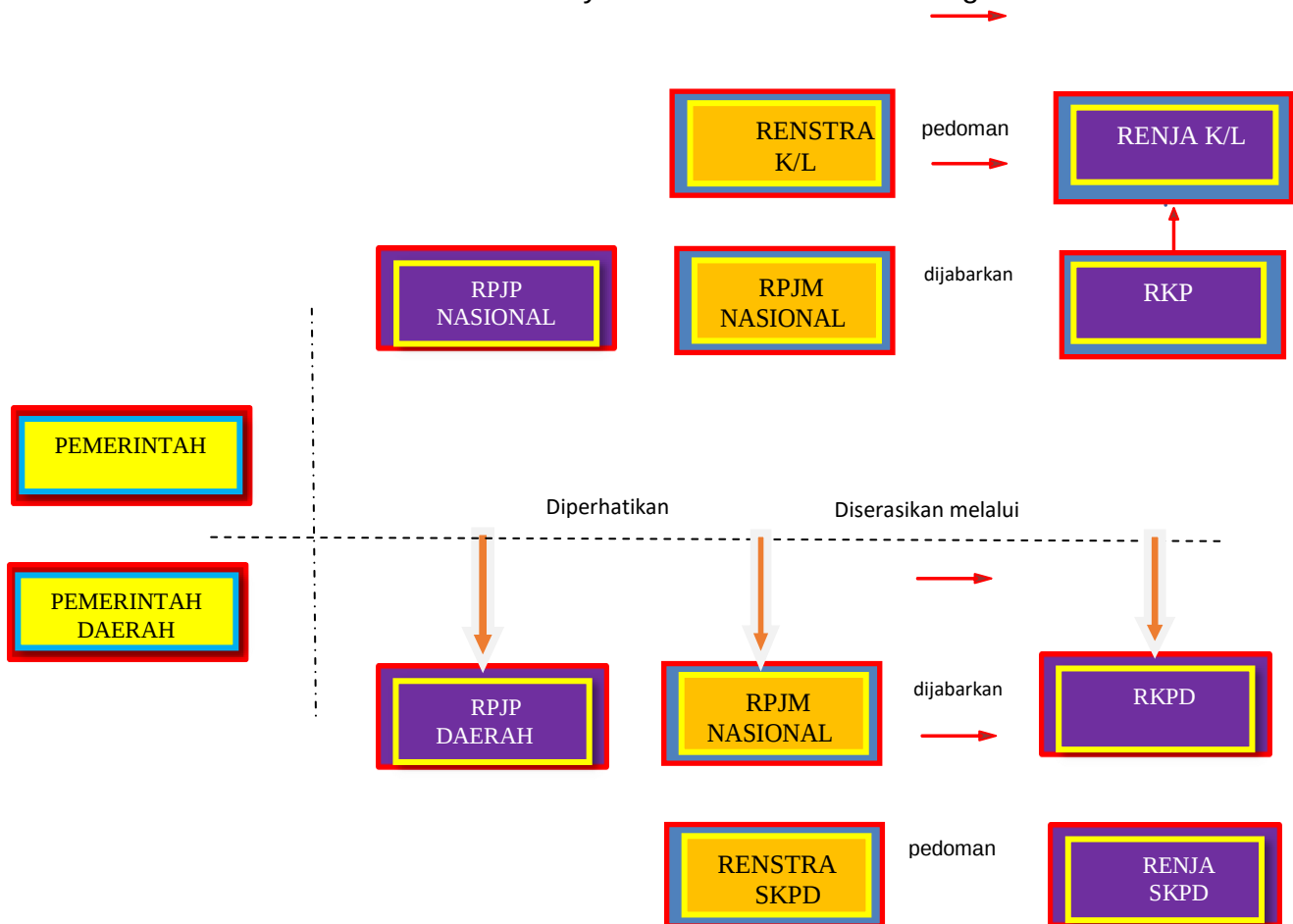
Proses penyusunan Renja OPD pada tingkatan OPD secara garis besar meliputi:

- 1) OPD menyusun Renja OPD.
- 2) Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

- 3) Rancangan Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- 5) Rancangan Renja-OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

3. Keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan:

Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah



Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada tingkat Pemerintah Pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui MUSRENBANG. Dari hasil MUSRENBANG maka Menteri menyusun Rancangan Akhir RKP dan atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat Kementerian/Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen- dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional dan dari RPJP Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD dan seperti halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan ke RENJA OPD.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh OPD harus menyusun RENSTRA OPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya disusun RENJA OPD yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA OPD untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA-OPD. Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016;

16. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru;
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021;
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Renstra OPD maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Tujuan dibuatnya Rencana Kerja OPD ini adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025, sehingga akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan; |
| Bab II | Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat; |
| Bab III | Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, serta Program dan Kegiatan; |
| Bab IV | Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran yang memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian. |

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANJARBARU SELATAN TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tahun lalu sampai tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Turunan Renja OPD Tahun 2025 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Belanja Langsung

Belanja Langsung untuk Tahun 2025 terdiri atas Program dan kegiatan dengan realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut :

**TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN
RENSTRA KANTOR KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA
BANJARBARU**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome / Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Hasil & Output Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun (2024)	Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun (2025)	Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
Prog ram	Keg			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingk at Capai an (%)			Realisasi Program dan kegiatan s/d tahun berjalan s.d TW I (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.272.183.892	9.121.628.371	98,38			2,141,715,956	30.11%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dok	2 dok	100 %	16.516.900	13.667.928	82.75	100 %	100 %	0	0%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 lap	3 lap	100 %	267.620.000	267.620.000	100	100 %	100 %	0	0%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan	53 org	53 org	100 %	6.466.115.772	6.405.129.372	99.06	100 %	100 %	749,212,436	11.71%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Penyelesaian Laporan	1 lap	1 lap	100 %	8.499.900	8.499.900	100	100 %	100 %	0	0%

		SKPD											
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Neraca Aset	12 lap	12 lap	100 %	14.130.000	14.130.000	100	100 %	100 %	0	0%
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 lap	1 lap	100 %	7.700.000	7.700.000	100	100 %	100%	0	0.00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100 %	116.000.000	115.497.500	99.57	100 %	100 %	0	0%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 paket	100 %	6.348.000	4.420.000	69.63	100 %	100 %	0	0.00%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 paket	5 paket	100 %	107.895.000	103.285.000	95.73	100 %	100 %	0	0%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100 %	6.000.000	6.000.000	100	100 %	100 %	0	0%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan dan Perundang-undangan	1 Dok	1 Dok	100%	2.000.000	1.005.000	50.25	100%	100%	0	0%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	6 lap	6 lap	100 %	86.207.000	83.023.614	96.31	100 %	100 %	7,878,358	29.98%
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0 unit	0	0	0	0	0 %	0 %	0	0.00%
		Pengadaan Mebel	Jumlah Tersedianya Mebel	14 unit	14 unit	100 %	36.387.000	35.685.000	98.07	100 %	100 %	0	0.00%

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	2 Unit	2 Unit	100 %	126.994.000	126.200.000	99.37	100 %	100 %	0	0.00%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	2 unit	2 unit	100 %	121.213.120	120.680.000	99.56	100 %	100 %	0	0.00%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100%	1.160.000.000	1.158.000.000	99.83	100%	-	-	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 lap	36 lap	100 %	63.000.000	58.948.353	93.57	100 %	100 %	10.359.901	16.44%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	24 lap	24 lap	100 %	122.070.400	118.775.074	97.30	100 %	100 %	7,450,000	5.02%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100 %	86.104.050	52.409.930	60.87	100 %	100 %	3,480,000	5.55%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	100 %	131.277.750	103.340.700	78.72	100 %	100 %	5,620,000	4.82%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 kali	24 kali	100 %	9.800.000	9.800.000	100	100 %	100 %	0	0.00%

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100 %	304.305.000	301.811.000	99.18	100 %	100 %	0	0.00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 kali	12 kali	100 %	6.000.000	6.000.000	100	100 %	100 %	0	0.00%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2.290.756.000	2,177,109,800	97.71			682,072,150	27.09%
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 lap	1 lap	100 %	16.944.000	16.944.000	100	100 %	100 %	0	0.00%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dok	1 dok	100 %	2.060.415.000	2.025.490.000	98.30	100 %	100 %	155,550,000	7.95%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 dok	1 dok	100 %	40.000.000	40.000.000	100	100 %	100 %	0	0%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 lap	1 lap	100 %	133.397.000	133.397.000	100	100 %	100 %	0	0%

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 lap	1 lap	100 %	40.000.000	40.000.000	100	100 %	100 %	3,815,000	14.53%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						124.341.500	108.334.800	95.87			0	0.00%
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 lap	4 lap	100 %	20.000.000	20.000.000	100	100 %	100 %	2.800.000	14%
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	1 lem kem	1 lem kem	100 %	104.341.500	75.556.150	72.41	100 %	100 %	0	0.00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						145.600.000	165.530.000	93.41			0	0%
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	1 laporan	100 %	145.600.000	145.600.000	100	100 %	100 %	0	0%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						11.500.000	11.500.000	100			0	0.00%
		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 dokumen	1 dokumen	100 %	11.500.000	11.500.000	100	100 %	100 %	0	0.00%

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sangat baik dengan rata-rata realisasi 97,71% Sedang realisasi atau serapan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota baik yaitu mencapai 98,58%. Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari masing- masing program bisa dilihat ditabel atas.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

Kecamatan Banjarbaru Selatan mempunyai 5 Program dan 12 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan. Program yang dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program yang berkaitan dengan kinerja pelayanan pada Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 5 Kegiatan yaitu :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Analisis kinerja pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Renstra 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Utama
Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.5	88.19	100.79%
		Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	82.5	66.6	80.73%
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	12	11	91.67%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan	100%	100%	100%
4	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi yang terlaksana	100%	100%	100%

Tabel 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
KANTOR KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU

NO	SASARAN STRATEGIS SETELAH REVIEW	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun					Proyeksi
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
			(n-2)	(n-1)	n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,75	86	86,5	87	87.5	88	88,72	88,72	87,89	88.23	88.19	88
		Indeks Kepatuhan Pelayanan	100	81	81,5	82	82.5	83	100	100	100	62.5	66.6	83
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	-	-	12	24	36	48	-	-	12	24	35	47
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	-	-	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100
4	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi yang terlaksana	-	-	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU

Terdapat permasalahan / kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Perlunya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Perlunya Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

Dari beberapa hambatan/permasalahan atau isu – isu diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
3. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Strategi-strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja yang maksimal akan dicapai dari masing-masing sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan cara:
 - Digitalisasi Pelayanan: Mengembangkan layanan administrasi berbasis website/aplikasi untuk perizinan, surat menyurat, dan pengaduan masyarakat.
 - Peningkatan Kompetensi SDM: Melakukan pelatihan rutin bagi aparatur kecamatan tentang standar pelayanan, etika pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - Penerapan Standar Pelayanan Publik: Menetapkan SOP pelayanan yang jelas, transparan, dan terukur untuk semua jenis pelayanan.
 - Survei Kepuasan Masyarakat: Melakukan survei kepuasan secara periodik untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelayanan.
 - Melengkapi Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan agar mendapatkan nilai maksimal pada hasil Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan cara:
 - Optimalisasi Forum Musyawarah Kelurahan: Melibatkan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan kelurahan melalui musyawarah rutin.
 - Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM: Mengadakan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha kecil menengah.
 - Program Partisipatif Lingkungan: Menggalakkan program bersih lingkungan, posyandu, dan kegiatan sosial berbasis masyarakat.
 - Peningkatan Literasi Digital: Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan layanan digital pemerintah dan informasi publik.
3. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan cara:
 - Patroli Rutin dan Pengawasan Lingkungan: Bersama aparat keamanan, meningkatkan pengawasan wilayah terutama di titik rawan gangguan ketertiban.
 - Peningkatan Peran Satlinmas: Memberdayakan satuan perlindungan masyarakat di kelurahan untuk menjaga ketertiban acara masyarakat dan

lingkungan.

- Sosialisasi Hukum dan Ketertiban: Melaksanakan sosialisasi tentang aturan hukum, ketertiban, dan sanksi kepada masyarakat secara berkala.

4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan cara:

- Koordinasi Lintas Sektor: Meningkatkan sinergi antar instansi pemerintahan, organisasi masyarakat, dan tokoh adat dalam penyelenggaraan urusan umum.
- Pemanfaatan Data Wilayah: Mengembangkan database kependudukan, potensi wilayah, dan sarana prasarana untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Optimalisasi Sistem Informasi Kecamatan: Mengintegrasikan data administrasi dan pelayanan publik berbasis sistem informasi.

Indikator keberhasilan didapat dari hasil ersentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah dan program pemberdayaan. Penurunan angka gangguan ketertiban di lingkungan masyarakat serta Peningkatan capaian program urusan pemerintahan umum tepat waktu dan sesuai target.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD kota disusun berpedoman pada RPJMD kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh SKPD dalam menyusun rancangan awal Renja Perubahan SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Hasil analisis terhadap rancangan awal RKPD dibandingkan dengan kebutuhan menunjukkan perlunya penyesuaian-penyesuaian baik dalam bentuk pengurangan beberapa kegiatan maupun terkait dengan sasaran lokasi, dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan kegiatan maupun pertimbangan teknis sasaran lokasi.

Perbandingan Program/Kegiatan berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi			Target indikatif (Rp. 9.818.860.009)					Kebutuhan Dana (Rp. 11.269.624.665)	Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Banjarbaru	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai	Rp. 7.428.218.109	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Banjarbaru	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai	Rp. 8.872.141.965	
				100%					100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banjarbaru	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	100%	Rp. 279.120.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banjarbaru	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	100%	Rp. 299.120.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp. 8.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp. 23.500.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp. 270.620.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp. 270.620.000	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	Rp. 0	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Rp. 5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	Rp. 6.463.800.209	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	Rp. 7.450.165.835	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banjarbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	Rp. 6.440.300.209	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banjarbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/Bulan	Rp. 7.426.665.835	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp. 8.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp. 8.500.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp. 15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp. 15.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Banjarbaru	Persentase Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Rp. 7.700.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Banjarbaru	Persentase Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Rp. 7.700.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Banjarbaru	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp. 7.700.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Banjarbaru	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	Rp. 7.700.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banjarbaru	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	Rp. 271.175.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banjarbaru	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	Rp. 305.979.200	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banjarbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp. 20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banjarbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp. 20.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Banjarbaru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp. 6.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Banjarbaru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp. 6.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banjarbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp. 176.708.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banjarbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp. 221.696.500	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Banjarbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp. 5.999.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Banjarbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp. 5.999.700	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp. 2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp. 2.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Rp. 64.979.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Rp. 49.783.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarbaru	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	Rp. 0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarbaru	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	Rp. 38.006.230	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp. 0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banjarbaru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Rp. 38.006.230	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Cakupan penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	Rp. 211.264.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Cakupan penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	Rp. 211.264.200	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Rp. 63.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Rp. 63.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	Rp. 148.264.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	Rp. 148.264.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	Rp. 195.158.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	Rp. 559.906.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp. 62.662.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp. 62.662.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Rp. 116.596.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Rp. 116.596.500	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banjarbaru	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24 Unit	Rp. 9.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banjarbaru	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27 Unit	Rp. 9.800.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Rp. 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp. 364.748.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	Rp. 6.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	Rp. 6.100.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Banjarbaru	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Banjarbaru Selatan)	83 Nilai	Rp. 2.122.521.900	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Banjarbaru	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Banjarbaru Selatan)	83 Nilai	Rp. 2.144.359.700	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Banjarbaru Selatan)	88 Nilai				Indeks Kepuasan Masyarakat (Banjarbaru Selatan)	88 Nilai		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Banjarbaru	Persentase Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi Prosentase perencanaan pembangunan pemerintahan ditingkat kecamatan yang disepakati	100 %	Rp. 1.934.625.900	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Banjarbaru	Persentase Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi Prosentase perencanaan pembangunan pemerintahan ditingkat kecamatan yang disepakati	100 %	Rp. 1.971.325.900,	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Banjarbaru	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan	Rp. 16.999.900	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Banjarbaru	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan	Rp. 16.999.900	

	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Rp. 1.917.626.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Rp. 1.954.676.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Banjarbaru	Persentase Pelayanan Kessos yang Terverifikasi Persentase Pelayanan ketentraman dan Ketertiban umum yang terverifikasi Prosentase Pelayanan Ekobang yang Terverifikasi	100%	Rp. 187.896.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Banjarbaru	Persentase Pelayanan Kessos yang Terverifikasi Persentase Pelayanan ketentraman dan Ketertiban umum yang terverifikasi Prosentase Pelayanan Ekobang yang Terverifikasi	100%	Rp. 173.033.800	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Rp. 35.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Rp. 26.249.900	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Banjarbaru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	Rp. 117.896.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Banjarbaru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	Rp. 117.896.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Banjarbaru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Rp. 35.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Laporan	Rp. 26.249.900	

	yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Banjarbaru	Jumlah RT Mandiri	12 RT	Rp. 120.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Banjarbaru	Jumlah RT Mandiri	12 RT	Rp. 111.503.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Banjarbaru	% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya % Elemen Masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swadaya Persentase Saprasi yang selesai dibangun Prosentase TL Pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi	100 %	Rp. 20.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Banjarbaru	% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya % Elemen Masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swadaya Persentase Saprasi yang selesai dibangun Prosentase TL Pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi	100 %	Rp. 20.000.000	
	Evaluasi Kelurahan	Banjarbaru	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	Rp. 20.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Banjarbaru	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	Rp. 20.000.000	

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Banjarbaru	% lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	Rp. 100.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Banjarbaru	% lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	Rp. 91.503.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Banjarbaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 100.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Banjarbaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 91.503.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Banjarbaru	Persentase Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselenggarakan (Banjarbaru Selatan)	100%	Rp. 141.620.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Banjarbaru	Persentase Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselenggarakan (Banjarbaru Selatan)	100%	Rp. 135.120.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Banjarbaru	Persentase Cakupan Data Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diverifikasi	100%	Rp. 141.620.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Banjarbaru	Persentase Cakupan Data Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diverifikasi	100%	Rp. 135.120.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Banjarbaru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Rp. 141.620.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Banjarbaru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Rp. 135.120.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Banjarbaru	Persentase Koordinasi Yang terlaksana	100%	Rp. 6.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Banjarbaru	Persentase Koordinasi Yang terlaksana	100%	Rp. 6.500.000	

	N UMUM					UMUM					
	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Banjarb aru	Persentase Jumlah Koordinasi yang terlaksana	100%	Rp. 6.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Banjarbaru	Persentase Jumlah Koordinasi yang terlaksana	100%	Rp. 6.500.000	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Banjarb aru	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Rp. 6.500.000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Rp. 6.500.000	

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Kepatuhan Pelayanan

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengetahui faktor-faktor atau dimensi-dimensi yang merupakan kekurangan dari pelayanan publik tersebut yang nantinya bisa dijadikan masukan ke depan bagi Kecamatan Banjarbaru Selatan agar dapat lebih meningkatkan kualitas/kinerja pelayanan kepada masyarakat.

6. Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Indikator kinerja ini digunakan sebagai alat untuk mengukur kepatuhan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan standar kepatuhan yang pelaksanaan penilaiannya dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang bermusyawarah dalam musrenbang desa. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan terkait yang didasarkan pada masukan dari kelurahan lingkup Kecamatan Banjarbaru Selatan. Daftar rencana kegiatan prioritas Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2025 bisa dilihat di tabel 2.5 dibawah berikut.

TABEL 2.5 RENCANA KERJA PERUBAHAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN	100%	Rp. 8.872.141.965	APBD KOTA BANJARBARU		100%	Rp 8.538.994.409
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD		100%	Rp. 299.120.000			100%	Rp. 291.620.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	Rp. 23.500.000			2 Dokumen	Rp. 9.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Lporan	Rp. 270.620.000			3 Lporan	Rp. 272.620.000
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	Rp. 5.000.000			1 Dokumen	Rp. 10.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun		100%	Rp. 7.450.165.835			100 %	Rp. 7.467.300.189

		sesuai ketentuan						
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	Rp.	7.426.665.835		53 Orang/Bulan	Rp. 7.440.300.189
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp.	8.500.000		1 Laporan	Rp. 9.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp.	15.000.000		4 Laporan	Rp. 18.000.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	Rp.	7.700.000		100%	Rp. 9.000.000
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporang Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporang Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	Rp.	7.700.000		1 Laporan	Rp. 9.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	Rp.	305.979.200		100%	Rp. 295.424.220
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	Rp.	20.000.000		2 Paket	Rp. 22.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pakai Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	Rp.	6.500.000		1 Paket	Rp. 7.500.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik kantor yang disediakan	6 Paket	Rp.	221.696.500		6 Paket	Rp. 185.924.220
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	2 Paket	Rp.	5.999.700		2 Paket	Rp. 7.500.000

	Penggandaan	Penggandaan yang disediakan						
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	Rp.	2.000.000		1 Dokumen	Rp. 2.500.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Rp.	49.783.000		6 Laporan	Rp. 70.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	Rp.	38.006.230		100%	Rp 40.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 Unit	Rp.	0		Unit	Rp 40.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 Unit	Rp.	0		Unit	Rp 0
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp.	0		Unit	Rp 0
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp.	0		Unit	Rp 0
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	Rp.	38.006.230		Unit	Rp. 0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	Rp.	211.264.200		100%	Rp. 220.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Laporan	Rp.	63.000.000		2 Laporan	Rp. 70.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	7 Laporan	Rp.	148.264.200		24 Laporan	Rp. 150.000.000

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	Rp. 559.906.500			100%	Rp. 215.650.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Rp. 62.662.000			1 Unit	Rp. 70.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Rp. 116.596.500			9 Unit	Rp. 126.650.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	27 Unit	Rp. 9.800.000			24 Unit	Rp. 11.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	1 Unit	Rp. 364.748.000			0 Unit	Rp. 0
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	17 Unit	Rp. 6.100.000			16 Unit	Rp. 8.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Banjarbaru Selatan) Indeks Kepuasan Masyarakat (Banjarbaru Selatan)	88 Nilai 83 Nilai	Rp. 2.144.359.700			88.5 Nilai 83.5 Nilai	Rp. 2.243.626.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Pemerinatahan yang terverifikasi Prosentase perencanaan pembangunan pememrintahan ditingkat	100 % 100 %	Rp. 1.971.325.900			100 %	Rp. 2.043.226.000

		kecamatan yang disepakati							
7.01.02.2.1.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan	Rp. 16.649.900			1 Laporan	Rp. 18.000.000
7.01.02.2.1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	Rp. 1.954.676.000			1 Dokumen	Rp. 2.025.226.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelayanan Kessos yang Terverifikasi Persentase Pelayanan ketentraman dan Ketertiban umum yang terverifikasi Prosentase Pelayanan Ekobang yang Terverifikasi		100 % 100 % 100 %	Rp. 173.033.800			100 %	Rp. 200.400.000
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan		1 Dokumen	Rp. 26.249.900			1 Dokumen	Rp. 40.000.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan NonPerizinan pada Urusan Pemerintahan		1 Laporan	Rp. 120.534.000			1 Laporan	Rp. 120.400.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan		1 Laporan	Rp. 26.249.900			1 Laporan	Rp. 40.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri		12 RT	Rp. 111.503.000			12 RT	Rp. 145.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	% Elemen Masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan		100 % 100 % 100 %	Rp. 20.000.000			100 %	Rp. 25.000.000

		Swadaya Persentase Saprass yang selesai dibangun Prosentase TL Pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi							
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		1 Laporan	Rp. 20.000.000			1 Laporan	Rp. 25.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	% lembaga kemasyarakatan yang aktif		100 %	Rp. 91.503.000			100 %	Rp. 120.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyaraktayang diselenggarakan		1 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 91.503.000			1 Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 120.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN dan KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselsesaikan (Banjarbaru Selatan)		100 %	Rp. 135.120.000			100 %	Rp. 150.600.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	Persentase Cakupan Data Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diverifikasi		100 %	Rp. 135.120.000			100 %	Rp. 150.600.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengn Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat		1 Laporan	Rp. 135.120.000			1 Laporan	Rp. 150.600.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	% KOORDINASI YANG TERLAKSANA		100 %	Rp. 6.500.000			100 %	Rp. 7.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Jumlah Koordinasi yang terlaksana		100 %	Rp. 6.500.000			100 %	Rp. 7.000.000

7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan yang Bukan Merupakan Kewenangan daerah dan Tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.	1 Dokumen	Rp. 6.500.000		1 Dokumen	Rp. 7.000.000
TOTAL				Rp. 11.269.624.665			Rp. 11.085.220.409

BAB III

TUJUAN, SASARAN KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Banjarbaru Selatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2025, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Millenium Development Goals (MDG's)*. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Tahun 2025 dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru dapat menyentuh sasaran yang tepat.

**3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
KOTA BANJARBARU.**

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategis goal*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indicator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target
Tujuan : Meningkatkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	BB
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	88 Nilai 83 Nilai
Sasaran 2 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	12 RT
Sasaran 3 : Meningkatkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselsesaikan	100 %
Sasaran 4 : Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Yang Terlaksana	100 %

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan

bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 - I.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - I.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - I.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - I.1.3 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 - I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - I.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - I.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - I.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
 - I.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - I.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - I.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - I.4.1 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
 - I.4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - I.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - I.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - I.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - I.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - I.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - I.5.1 Pengadaan mebel
 - I.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - I.5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - I.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - I.5.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - I.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- I.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - I.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- I.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - I.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - I.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - I.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - I.7.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
 - I.7.5 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK
 - II.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - II.1.1 Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Terkait
 - II.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - II.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - II.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - II.2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
 - II.2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN
 - III.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - III.1.1 Evaluasi Kelurahan
 - III.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - III.2.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN dan KETERTIBAN UMUM
 - IV.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - IV.1.1 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - V.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

V.1.1 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

PADA RENJA KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

Rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 Kecamatan Banjarbaru Selatan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SKPD

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025					
							Kelompok Sasaran	Lokas i	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Sumb er Dana
							Setelah Perubahan	Setelah Perubahan	Setelah Perubahan	Setelah Perubahan	Setelah Perubahan	Setelah Perubahan
1					2		4	5	6	7		8
					UNSUR KEWILAYAHAN					Rp. 9.818.860.009	Rp. 11.269.624.665	
7	0	1			KECAMATAN ADMINISTRASI					Rp. 9.818.860.009	Rp. 11.269.624.665	
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	A Nilai	Rp. 7.428.218.109	Rp. 8.872.141.965	APBD
		1	1			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			100%			
7	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan peyanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	100%	Rp. 279.120.000	Rp. 299.120.000	APBD
7	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	2 Dokumen	Rp. 8.500.000	Rp. 23.500.000	APBD
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	3 Laporan	Rp. 270.620.000	Rp. 270.620.000	APBD
7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	1 Dokumen	Rp. 0	Rp. 5.000.000	APBD

						Sektoral Daerah						
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	100%	Rp. 5.762.370.480,00	Rp. 6.580.185.410	APBD
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	53 Orang/Bulan	Rp. 6.440.300.209	Rp. 7.426.665.835	APBD
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	1 Laporan	Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000	APBD
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	4 Laporan	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	APBD
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	100%	Rp. 7.700.000	Rp. 7.700.000	APBD
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	13 Laporan	Rp. 7.700.000	Rp. 7.700.000	APBD
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	100%	Rp. 271.175.200	Rp. 305.979.200	APBD
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	2 Paket	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	APBD
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	1 Paket	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	6 Paket	Rp. 176.708.000	Rp. 221.696.500	APBD

7	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	2 Paket	Rp. 5.999.700	Rp. 5.999.700	APBD
7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	1 Dokumen	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	APBD
7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	6 Laporan	Rp. 64.979.000	Rp. 49.783.000	APBD
7	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	100%	Rp. 978.299.000,00	Rp. 1.228.197.000	APBD
7	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	5 Unit	Rp. 0	Rp. 0	APBD
7	0	0	2.	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	2 Unit	Rp. 38.006.230	Rp. 38.006.230	APBD
7	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	100%	Rp. 15.113.729.900,00	Rp. 15.478.814.000	APBD
7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	2 Laporan	Rp. 63.000.000	Rp. 63.000.000	APBD
7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	7 Laporan	Rp. 148.264.200	Rp. 148.264.200	APBD
7	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	100%	Rp. 195.158.500	Rp. 559.906.500	APBD
7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	1 Unit	Rp. 62.662.000	Rp. 62.662.000	APBD

					Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	9 Unit	Rp. 116.596.500	Rp. 116.596.500	APBD
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	27 Unit	Rp. 9.800.000	Rp. 9.800.000	APBD
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	2 Unit	Rp. 0	Rp. 364.748.000	APBD
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	17 Unit	Rp. 6.100.000	Rp. 6.100.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Banjarbaru Selatan)	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	83 Nilai	Rp. 2.122.521.900	Rp. 2.144.359.700	APBD
						Indeks Kepuasan Masyarakat (Banjarbaru Selatan)	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	88 Nilai			APBD
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi Prosentase perencanaan pembangunan pememrintahan ditingkat kecamatan yang disepakati	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	100 %	Rp. 1.934.625.900	Rp. 1.971.325.900	APBD
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	1 Laporan	Rp. 16.999.900	Rp. 16.999.900	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	1 Dokumen	Rp. 1.917.626.000	Rp. 1.954.676.000	

						Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
7	012	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Kessos yang Terverifikasi Persentase Pelayanan ketentraman dan Ketertiban umum yang terverifikasi Prosentase Pelayanan Ekobang yang Terverifikasi	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	100%	Rp. 187.896.000	Rp. 173.033.800	APBD
7	012	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	1 Dokumen	Rp. 35.000.000	Rp. 26.249.900	APBD
7	012	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	1 Laporan	Rp. 117.896.000	Rp. 117.896.000	APBD
7	012	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	1 Laporan	Rp. 35.000.000	Rp. 26.249.900	APBD
7	013	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	12 RT	Rp. 120.000.000	Rp. 111.503.000	APBD
7	013	02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	% elemen masyakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya % Elemen Masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swadaya Persentase Saprass yang selesai dibangun Prosentase TL Pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	100 %	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	APBD
7	013	02	2.01	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	1 Laporan	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	APBD
7	013	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	% lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	100 %	Rp. 100.000.000	Rp. 91.503.000	APBD

7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	1 Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 100.000.000	Rp. 91.503.000	APBD
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselenggarakan (Banjarbaru Selatan)	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	100%	Rp. 141.620.000	Rp. 135.120.000	APBD
7	0	0	2.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Cakupan Data Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diverifikasi	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	100%	Rp. 141.620.000	Rp. 135.120.000	APBD
7	0	0	2.	00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	1 Laporan	Rp. 141.620.000	Rp. 135.120.000	APBD
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	% Koordinasi Yang terlaksana	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	100%	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	APBD
7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Jumlah Koordinasi yang terlaksana	Kecamatan Banjarbaru	Banjarbaru	100%	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	APBD
7	0	1	2.	00	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Banjarbaru	Banjar baru	1 Dokumen	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	APBD

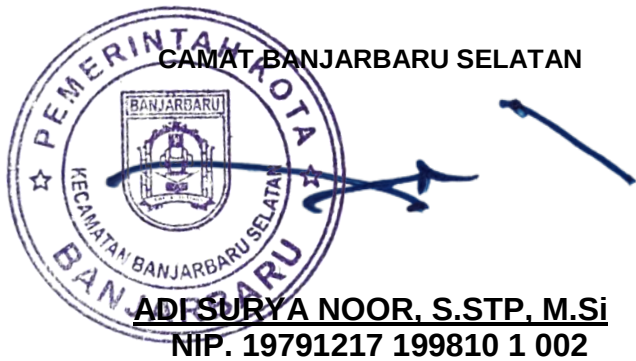
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan merupakan implementasi dari visi dan misi Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarbaru Selatan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun Perubahan 2025 Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terinspirasi, tersinergi dan berkelanjutan, antara sesama OPD di Pemerintahan Kota Banjarbaru.

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANJARBARU" and "KECAMATAN BANJARBARU SELATAN". Overlaid on the stamp is a blue ink signature. To the right of the stamp, the text "CAMAT BANJARBARU SELATAN" is printed. Below the signature, the name "ADI SURYA NOOR, S.STP, M.Si" and the NIP number "NIP. 19791217 199810 1 002" are printed.

CAMAT BANJARBARU SELATAN

ADI SURYA NOOR, S.STP, M.Si
NIP. 19791217 199810 1 002